

RINGKASAN

Muhammad Rizky Berutu
NIM: 190510054

**Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup
Terhadap Implementasi Upaya
Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Pada
Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Air PT. Sumatera Energi
Lestari Kabupaten Pakpak Bharat**

(Muhibbuddin, S.H., M.Hum dan Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Hum)

Pembangunan tidak saja memicu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa pengaruh pada pola pemanfaatan sumber daya alam dan resiko pada lingkungan seperti kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sehingga untuk menjaga kestabilan pola pemanfaatan sumber daya alam perlu adanya pengawasan. Adapun yang berwenang dalam pengawasan pembangunan yang berdampak pada lingkungan di Kabupaten Pakpak Bharat ialah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup terhadap implementasi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan pada pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan pembangkit listrik tenaga air oleh PT. Sumatera Energi Lestari yang tidak sesuai dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Meski begitu namun pada perakteknya pengawasan yang dilakukan belum di laksanakan semaksimal mungkin sehingga terjadinya pelanggaran kerusakan lingkungan. Selain itu upaya Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam menyikapi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan pembangkit listrik PT. Sumatera Energi Lestari mengeluarkan kebijakan Pemberhentian pembangunan sementara secara paksa, yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 76 ayat (1) "Menteri, gubernur atau bupati/wali kota menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan".

Disarankan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan agar lebih di tingkatkan lagi dan memberi pelatihan peningkatan kompetensi dan kapasitas pengawasan bagi pengawas lingkungan serta menindak tegas para pelaku kerusakan atau pencemaran lingkungan baik dari segi administrasi atau denda pemulihan, yang sejalan dengan Pasal 85 dan 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disarankan juga kepada PT. Sumatera Energi Lestari menaati peraturan yang telah ditetapkan yaitu UKL UPL agar tidak terjadinta kerusakan lingkungan.

Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup, UKL-UPL

SUMMARY

Muhammad Rizky Berutu
NIM: 190510054

Supervision of the Environmental Service on the Implementation of Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts in the Construction of Hydroelectric Power Plant of PT Sumatera Energi Lestari Pakpak Bharat Regency.

(Muhibbuddin, S.H., M.Hum dan Dr. Zainal Abidin Badar, S.H., M.Hum)

Carrying out any development not only triggers economic growth, but also has an influence on natural resource utilization patterns and risks to the environment such as environmental damage and pollution. To maintain the stability of natural resource utilization patterns, supervision is necessary. The authority to supervise development that has an impact on the environment in Pakpak Bharat district is the Pakpak Bharat District Environmental Service.

This research aims to analyze the supervision carried out by the Environmental Service regarding the implementation of environmental management and environmental monitoring efforts in the construction of hydroelectric power plants in the Pakpak Bharat Regency area, as well as the efforts made to address the legal implications arising from the construction of hydroelectric power plants by PT.- Sumatera Energi Lestari. The method used in this research is an empirical method with the nature of the research used being descriptive, the data sources used are primary data and secondary data.

Based on the results of the study, it shows that the supervision of the Environmental Service is carried out directly and indirectly. Even so, in practice the supervision carried out has not been carried out as much as possible so that violations of environmental damage occur. In addition, the Pakpak Bharat Regency Government's efforts in responding to environmental damage caused by the construction of the PT Sumatera Energi Lestari power plant issued a policy of forcibly stopping temporary construction, which refers to Law Number 32 of 2009 Article 76 paragraph (1) "The minister, governor or regent / mayor applies administrative sanctions to the person in charge and / or activities if the supervision finds a violation of the environmental permit".

It is recommended that the Environmental Service in carrying out supervision be further enhanced and provide training to increase competence and supervisory capacity for environmental supervisors and take firm action against perpetrators of environmental damage or pollution both in terms of administration or recovery fines, which are in line with Articles 85 and 87 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. It is also recommended that PT Sumatera Energi Lestari obey the established regulations, namely UKL UPL so that environmental damage does not occur.

Keywords: Supervision, Environment Agency, UKL-UPL